

PT Digital Micro Indonesia

Licensed by : Otoritas Jasa Keuangan

**Laporan Keuangan Dan Laporan Auditor Independen Untuk Tahun
Yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 /**

***Financial Statements And Independent Auditor's Report For The Year
Ended December 31, 2025 and 2024***

Daftar Isi

Table of Content

	Halaman / <i>Page</i>	
Surat Pernyataan Direksi		<i>.....Board of Director's Statements</i>
Laporan Auditor Independen.....		<i>.....Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan.....	1	<i>.....Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprensif Lain.....	3	<i>.....Statements of Profit or Loss and OtherComprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>.....Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas.....	5	<i>.....Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	6 - 64	<i>.....Notes to the Financial Statements</i>

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT

*DIRECTORS STATEMENT LETTER
REGARDING
RESPONSIBILITY TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED*

PT DIGITAL MICRO INDONESIA

PT DIGITAL MICRO INDONESIA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Markus Prommik	:	Name
Alamat Kantor	:	Menara Dea Tower II, 3 rd Floor, Unit 02 – B & 03 – B Kawasan Mega Kuningan Barat, Kav. E4.3 No.1-2 Jakarta Selatan, 12950	:	Official Address
NIK	:	2D41JE0002-X	:	ID Number
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that :

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Digital Micro Indonesia ("Perusahaan"); | 1. <i>We are responsible for preparation and presentation of the financial statements of PT Digital Micro Indonesia ("Company");</i> |
| 2. Laporan keuangan PT Digital Micro Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The financial statements of PT Digital Micro Indonesia have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Digital Micro Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information contained in the financial statements of PT Digital Micro Indonesia is complete and correct;</i> |
| b. Laporan keuangan PT Digital Micro Indonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The financial statements of PT Digital Micro Indonesia do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Digital Micro Indonesia. | 4. <i>We are responsible for the internal control system of PT Digital Micro Indonesia.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 25 Maret 2026/ Jakarta, March 25, 2026
PT Digital Micro Indonesia



Markus Prommik
Direktur Utama / President Director

Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

No/Ref. : 00073/2.1127/AU.1/09/0060-3/1/III/2026

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT Digital Micro Indonesia**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Digital Micro Indonesia ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

***To the Shareholders, Boards of Commissioners and
Directors
PT Digital Micro Indonesia***

Opinion

We have audited the financial statements of PT Digital Micro Indonesia ("the Company"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including information of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO


HENDRAWINATA HANNY
ERWIN & SUMARGO
Registered Public Accountants

Welly Adrianto, CPA

No. Ijin Akuntan Publik / Public Accountant License Number: AP. 0060

Jakarta, 25 Maret/ March 25, 2026

PT DIGITAL MICRO INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

PT DIGITAL MICRO INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Full Rupiah)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
<u>ASET</u>				<u>ASSETS</u>
<u>ASET LANCAR</u>				<u>CURRENT ASSETS</u>
Kas dan setara kas	4,22,23	10.940.482.762	5.160.341.261	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	5,22,23	1.366.138.549	3.899.413.018	Account receivables
Biaya dibayar di muka	6	80.514.803	80.763.529	Prepaid expenses
Aset lancar lainnya	7,22,23	673.874.573	546.313.595	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		13.061.010.687	9.686.831.403	Total Current Assets
<u>ASET TIDAK LANCAR</u>				<u>NON-CURRENT ASSETS</u>
Aset takberwujud	8	2.000.000.000	-	Intangible assets
Aset tetap	9	287.351.310	208.445.394	Fixed assets
Sewa guna usaha	10	187.362.222	178.538.534	Right - of - use assets
Aset pajak tangguhan	15d	262.838.411	193.702.473	Deferred tax assets
Uang jaminan	11,22,23	305.750.725	264.636.378	Security deposits
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.043.302.668	845.322.779	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		16.104.313.355	10.532.154.182	TOTAL ASSETS
<u>LIABILITAS</u>				<u>LIABILITIES</u>
<u>LIABILITAS JANGKA PENDEK</u>				<u>CURRENT LIABILITIES</u>
Utang lain-lain – Pihak ketiga	12,22,23	337.602.191	512.529.697	Other payables – Third parties
Utang pajak	15a	326.865.517	302.493.090	Taxes payables
Biaya yang masih harus Dibayar	22,23	350.934.259	173.441.416	Accrued expenses
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.015.401.967	988.464.203	Total Current Liabilities
<u>LIABILITAS JANGKA PANJANG</u>				<u>NON-CURRENT LIABILITIES</u>
Kewajiban imbalan pascakerja	13	1.194.720.046	880.465.783	Post-employment benefit obligation
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.194.720.046	880.465.783	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		2.210.122.013	1.868.929.986	TOTAL LIABILITIES

PT DIGITAL MICRO INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

PT DIGITAL MICRO INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Full Rupiah)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp13.190 per saham.				Share capital Rp13,190 par value per share
Modal dasar - 1.895.631 shares.				Authorized - 1,895,631 shares.
Modal ditempatkan dan disetor pada 2025 dan 2024 sejumlah 1.513.131 dan 1.058.631 saham	14	19.958.197.890	13.963.342.890	Issued and paid in 2025 and 2024 1,513,131 and 1,058,631 shares
Modal saham subskripsi	14	5.045.175.000	5.104.530.000	Subscribed shares capital
Akumulasi rugi		(11.109.181.548)	(10.404.648.694)	Accumulated deficit
JUMLAH EKUITAS		13.894.191.342	8.663.224.196	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		16.104.313.355	10.532.154.182	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Jakarta, 25 Maret 2026/ March 25, 2026



Markus Prommik
Direktur Utama / President Director

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT DIGITAL MICRO INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2025 dan 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

PT DIGITAL MICRO INDONESIA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
 For the Years Ended
 December 31, 2025 and 2024
 (Expressed in Full Rupiah)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
Pendapatan	16	15.427.153.106	16.358.096.744	Revenues
Biaya pendapatan		(240.774.435)	(198.500.914)	Cost of revenues
Laba kotor		15.186.378.671	16.159.595.830	Gross profits
Beban gaji dan imbalan karyawan	17	10.384.372.006	10.915.756.262	Salaries and employee benefit Expenses
Beban umum dan administrasi	18	3.112.004.926	2.786.408.613	General and administrative Expenses
Beban pemasaran		1.321.560.408	345.094.949	Marketing expenses
Beban kantor	19	1.024.064.953	1.081.328.030	Office expenses
Beban komunikasi		148.756.178	173.501.655	Communication expenses
Kerugian operasional lain-Bersih	20	128.141.460	(119.515.458)	Other operating expense-Net
Laba (rugi) sebelum pajak		(932.521.260)	977.021.779	Profit (loss) before tax
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	15b	104.083.481	(44.898.693)	Income tax (expense)/benefit
Laba (rugi) tahun berjalan		(828.437.779)	932.123.086	Profit (loss) for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Laba pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasca kerja	13	158.852.468	29.494.122	Re-measurement gain on post-employment benefit obligation
Pajak terkait	15d	(34.947.543)	(6.488.706)	Related tax
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		123.904.925	23.005.416	Other comprehensive income for the year, net of tax
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan		(704.532.854)	955.128.502	Total comprehensive profit (loss) for the year

Jakarta, 25 Maret 2026/ March 25, 2026



Markus Prommik
 Direktur Utama / President Director

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT DIGITAL MICRO INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

PT DIGITAL MICRO INDONESIA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Full Rupiah)

	Catatan/ Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Share Capital	Modal saham subskripsi/ Subscribed Shares Capital	Akumulasi Rugi/ Accumulated Deficit	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
Saldo per 31 Desember 2023/ Balance as of December 31, 2023		13.963.342.890	-	(11.359.777.196)	2.603.565.694
Laba tahun berjalan/ Profit for the year		-	-	932.123.086	932.123.086
Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		-	-	23.005.416	23.005.416
Modal saham subskripsi/ Subscribed shares capital		-	5.104.530.000	-	5.104.530.000
Saldo per 31 Desember 2024/ Balance as of December 31, 2024	13	13.963.342.890	5.104.530.000	(10.404.648.694)	8.663.224.196
Laba tahun berjalan/ Profit for the year		-	-	(828.437.779)	(828.437.779)
Disetor penuh/Fully Paid		5.994.855.000	(5.104.530.000)	-	890.325.000
Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		-	-	123.904.925	123.904.925
Modal subskripsi/ Subscribed capital		-	5.045.175.000	-	5.045.175.000
Saldo per 31 Desember 2025/ Balance as of December 31, 2025	13	19.958.197.890	5.045.175.000	(11.109.181.548)	13.894.191.342

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT DIGITAL MICRO INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

PT DIGITAL MICRO INDONESIA
STATEMENT OF CASH FLOWS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Full Rupiah)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Laba (rugi) sebelum pajak		(932.521.260)	977.021.779	Profit (loss) before income tax
Penyusutan aset hak guna usaha	10	740.625.237	788.261.902	Depreciation right of use assets
Provisi atas kewajiban imbalan pasca kerja	13,17	473.106.731	380.865.541	Provision for post-employment benefit obligation
Kerugian penghapusan aset tetap	9	264.001	3.849.742	Loss on assets disposal
Penyusutan aset tetap	9,18	144.597.797	135.707.085	Depreciation fixed assets
Arus kas operasi sebelum perubahan pada aset dan liabilitas		426.072.506	2.285.706.049	Operating cash flow before changes in assets and liabilities
Perubahan modal kerja:				Changes in working capital:
Piutang usaha		2.661.924.531	(482.916.265)	Account receivables
Biaya dibayar di muka		248.726	37.544.899	Prepaid expenses
Aset lancar lainnya		(109.170.352)	75.213.713	Other current assets
Aset lain-lain		(41.114.344)	34.116.984	Other assets
Utang lain-lain		(174.927.503)	(810.863.995)	Other payables
Utang pajak		(104.013.512)	(37.755.446)	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar		177.492.964	(207.286.443)	Accrued expenses
Kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi		2.836.513.016	893.759.496	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	9	(223.767.714)	(50.686.920)	Purchases of fixed assets
Aset takberwujud	8	(2.000.000.000)	-	Intangible assets
Kerugian penghapusan aset tetap	9	(264.001)	(3.849.742)	Loss on assets disposal
Kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi		(2.224.031.715)	(54.536.662)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Modal subskripsi	14	5.045.175.000	5.104.530.000	Proceeds from capital subscriptions
Setoran modal		890.325.000	-	Paid in capital
Pembayaran liabilitas sewa	27	(767.839.800)	(801.579.669)	Payment of lease liability
Kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan		5.167.660.200	4.302.950.331	Net cash provided by financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		5.780.141.501	5.146.022.907	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		5.160.341.261	14.318.354	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	10.940.482.762	5.160.341.261	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

1. UMUM

1.1 Pendirian

PT Digital Micro Indonesia (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris Seba Silawati, S.H., M.Kn. No. 3 tanggal 10 Oktober 2016. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0045103.AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 22 tanggal 10 Oktober 2025 dari Azdi Fauzan Khalid, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Aurora Wina Muthmainnah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, mengenai pengangkatan kembali direksi dan komisaris, dan perubahan anggaran dasar Perubahan terakhir telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0349672 tanggal 13 Oktober 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0239968.AH.01.11 Tahun 2025 pada tanggal 13 Oktober 2025.

Sesuai dengan Akta Notaris Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, S.H., M.Kn., No. 59 Pasal 3 tanggal 28 Agustus 2017, lingkup aktivitas Perusahaan adalah menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pada tanggal 8 Juni 2018, Perusahaan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat Tanda Bukti Terdaftar dari OJK Nomor S-381/NB.213/2018 sehingga pelaksanaan kegiatan usahanya diawasi secara ketat oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

1. GENERAL INFORMATION

1.1 Establishment

PT Digital Micro Indonesia (“the Company”) was established based on Notarial Deed No. 3 of Seba Silawati, S.H., M.Kn. dated October 10, 2016. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0045103.AH.01.01. 2016 dated October 11, 2016.

The Company’s Articles of Association have undergone several amendments, most recently by Deed No. 22 dated October 10, 2025, prepared by Azdi Fauzan Khalid, S.H., M.Kn., as the substitute for Aurora Wina Muthmainnah, S.H., M.Kn., Notary in East Jakarta, regarding the reappointment of the Board of Directors and Board of Commissioners, and the amendment of the Articles of Association. This latest amendment has been accepted by the Minister of Law and Human Rights in Letter No. AHU-AH.01.09-0349672 dated October 13, 2025, and has been recorded in the Company Register No. AHU-0239968.AH.01.11 of 2025 on October 13, 2025.

According to Notarial Deed No. 59 Article 3 dated August 28, 2017 of Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti, S.H., M.Kn., the Company’s activities are providing, managing, and operating lending and borrowing services based on financial technology.

On June 8, 2018, the Company was registered with the Financial Services Authority (“OJK”) as a Provider of Information Technology-Based Lending and Borrowing Services, with a Registration Certificate from OJK No. S-381/NB.213/2018. As a result, its business activities are strictly supervised by OJK in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-Based Financing Services.

1. UMUM (Lanjutan)

1.1 Pendirian (Lanjutan)

Pada tanggal 8 September 2021, Perusahaan telah mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat pemberian izin dari OJK Nomor S-840/NB.223/2021 sehingga pelaksanaan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Perusahaan berlokasi di Menara DEA II, lantai 3, Unit 02-B & 03-B, Kawasan Mega Kuningan, Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2, Jakarta Selatan 12950, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.

Digital Micro Pte. Ltd. adalah pemegang saham pengendali Perusahaan.

Perusahaan memulai kegiatan operasi di tahun 2016.

1.2 Susunan Komisaris dan Direksi

Susunan dewan komisaris dan direktur Perusahaan sesuai dengan Akta No. 22 tanggal 10 Oktober 2025 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2025 dan 2024/ December 31, 2025 and 2024	
<u>Dewan Komisaris</u>	:
Komisaris	: Andar Perdana Widiastono
<u>Direktur</u>	
Direktur Utama	: Markus Prommik
Direktur	: Kemal Fadhil Armansyah

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki masing-masing 37 dan 34 karyawan tetap.

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

1.1 Establishment (Continued)

On September 8, 2021, the Company obtained a permanent license (No. S-840/NB.223/2021) from the Financial Services Authority (“OJK”) to act as an Information Technology based Money Lending and Borrowing Service Provider. The activities of the Company are supervised by OJK, based on OJK Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology Based Joint Funding Services.

The Company is located at Menara DEA Tower II, 3rd Floor, Unit 02-B & 03-B, Mega Kuningan District, West Mega Kuningan street Kav. E4.3 No. 1-2, South Jakarta 12950, Kel. East Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. South Jakarta, Prov. DKI Jakarta.

Digital Micro Pte. Ltd. is the controlling shareholders of the Company.

The Company started its commercial operations in 2016.

1.2 Boards of Commissioners and Directors

The composition of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors, in accordance with Deed No. 22 dated October 10, 2025, is as follows:

**Board of
Commissioners:**
Commissioner

Board of Directors
President Director
Director

As of December 31, 2025 and 2024, the Company had 37 and 34 permanent employees, respectively.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

2.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan adalah konsep biaya historis, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan dasar yang diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait dari masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dimana laba rugi disesuaikan dengan dampak transaksi yang bersifat non-tunai, setiap penangguhan atau akrual di masa lalu atau masa depan penerimaan atau pembayaran kas operasi dan pos pendapatan atau beban yang terkait dengan investasi atau kegiatan pembiayaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

2.1 Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The measurement used in the financial statements is historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of its respective accounts.

The statements of cash flows have been prepared using the indirect method whereby profit or loss is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and items of income or expense associated with investing or financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Company.

The accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended December 31, 2025, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2025, Perusahaan menerapkan PSAK baru yang berlaku efektif pada tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

Penerapan standar baru dan amandemen yang relevan dengan operasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi; dan
- PSAK 221: Dampak Perubahan Tingkat Tukar Mata Uang Asing.

Dampak dari penerapan standar akuntansi baru ini adalah sebagai berikut:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi

PSAK 117, yang menggantikan PSAK 104, memperkenalkan model pengukuran yang konsisten untuk kontrak asuransi, dengan fokus pada perkiraan saat ini dan Margin Layanan Kontrak (CSM), yang mewakili laba yang belum diakui selama periode pertanggungan. Hal ini berbeda dengan praktik akuntansi yang beragam dalam PSAK 104, yang sering kali menekankan penerimaan premi dan klaim yang telah terjadi. PSAK 117 juga mewajibkan identifikasi kontrak yang merugikan, di mana biaya yang diharapkan melebihi manfaat, yang mengharuskan pengakuan kerugian segera dalam laba atau rugi, suatu konsep yang tidak dibahas dalam PSAK 104.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.1 Basis of Preparation of the Financial Statements (Continued)

Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards

Effective January 1, 2025, the Company adopted new SFAS that are effective for application from that date. Changes to the Company's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.

The adoption of the following new standards and amendment which are relevant to the Company's operations are follows:

- SFAS 117: Insurance Contracts; and*
- SFAS 221: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.*

Impact of adoption these new accounting standards are follows:

- SFAS 117: Insurance Contracts*

SFAS 117, replacing SFAS 104, introduces a consistent measurement model for insurance contracts, focusing on current estimates and the Contractual Service Margin (CSM), which represents unearned profit recognized over the coverage period. This contrasts with SFAS 104's diverse accounting practices, which often underlined premium receipts and incurred claims. SFAS 117 also mandates the identification of onerous contracts, where expected costs exceed benefits, requiring immediate loss recognition in profit or loss, a notion not addressed in SFAS 104.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dampak dari penerapan standar akuntansi baru ini adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- PSAK 117: Kontrak Asuransi (Lanjutan)

PSAK 117 berlaku untuk kontrak asuransi secara keseluruhan dan tidak terbatas pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu, standar ini meningkatkan keterbandingan melalui persyaratan penyajian dan pengungkapan yang komprehensif, serta memisahkan pendapatan asuransi dari komponen investasi. Secara keseluruhan, PSAK 117 bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang posisi keuangan penanggung, mengatasi ketidakteraturan di bawah PSAK 104, dan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang kesehatan keuangan dan paparan risiko.

- PSAK 221: Dampak Perubahan Tingkat Tukar Mata Uang Asing

Perubahan tersebut menjelaskan situasi di mana suatu mata uang dianggap tidak dapat ditukar dan memberikan panduan tentang cara menghitung kurs spot saat suatu mata uang tidak dapat ditukar.

Perubahan tersebut juga menetapkan persyaratan pengungkapan baru untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami dampak dari mata uang yang tidak dapat ditukar terhadap kinerja keuangan, posisi, dan arus kas suatu entitas.

Perubahan tersebut juga menetapkan persyaratan pengungkapan baru untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami dampak dari mata uang yang tidak dapat ditukar terhadap kinerja keuangan, posisi, dan arus kas suatu entitas.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.1 Basis of Preparation of the Financial Statements (Continued)

Impact of adoption these new accounting standards are follows: (Continued)

- *SFAS 117: Insurance Contracts (Continued)*

SFAS 117 applies to entirely insurance contracts and is not restricted to insurance companies. Therefore, the standard improves comparability through comprehensive presentation and disclosure requirements, distinctive insurance revenue from investment components. Overall, SFAS 117 aims to provide a clearer representation of an insurer's financial position, addressing irregularities under SFAS 104 and enhancing stakeholders' understanding of financial health and risk exposure.

- *SFAS 221: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*

The amendments explain the situations under which a currency is considered non-exchangeable and provide guidance on how to estimate the spot exchange rate when a currency is not exchangeable.

The amendments also present new disclosure requirements to help users of financial statements understand the impact of a currency not being exchangeable on an entity's financial performance, position and cash flows.

The amendments also present new disclosure requirements to help users of financial statements understand the impact of a currency not being exchangeable on an entity's financial performance, position and cash flows.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dampak dari penerapan standar akuntansi baru ini adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- PSAK 221: Dampak Perubahan Tingkat Tukar Mata Uang Asing (Lanjutan)

Selain itu, perubahan tersebut menetapkan bahwa entitas harus menerapkan pendekatan yang konsisten untuk menentukan kelayakan tukar dan nilai tukar spot yang digunakan ketika kelayakan tukar tidak ada. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keseragaman dan kepraktisan informasi keuangan yang disediakan kepada pengguna, terutama dalam situasi di mana kondisi ekonomi dapat melemah dengan cepat akibat mata uang yang tidak dapat ditukar.

Setidaknya, suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai:

- sifat dan dampak keuangan dari mata uang yang tidak dapat ditukar dengan mata uang lain;
- kurs spot yang digunakan;
- metode perkiraan; dan
- risiko yang dihadapi entitas akibat mata uang yang tidak dapat ditukar dengan mata uang lain.

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan, di diskusikan di Catatan 28.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.1 Basis of Preparation of the Financial Statements (Continued)

Impact of adoption these new accounting standards are follows: (Continued)

- *SFAS 221: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. (Continued)*

Additionally, the amendments stipulate that entities should apply a constant approach to determine exchangeability and the spot exchange rate to use when exchangeability is lacking. These changes aim to improve the uniformity and practicality of financial information provided to users, especially in situations where economic conditions can weaken rapidly due to non-exchangeable currencies.

At a minimum, an entity must disclose information about:

- *the nature and financial effects of the currency not being exchangeable into the other currency;*
- *the spot exchange rate(s) used;*
- *the estimation method; and*
- *the risks to which the entity is exposed because of the currency not being exchangeable into the other currency.*

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2025 and have not been early adopted by the Company, are discussed in Note 28.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.2 Saldo dan Transaksi Mata Uang Asing

Perusahaan menerapkan PSAK No. 221, “Dampak Perubahan Tingkat Tukar Mata Uang Asing”.

PSAK ini mengatur pengukuran dan penyajian mata uang suatu entitas dimana pengukuran mata uang harus menggunakan mata uang fungsional sementara penyajian mata uang dapat menggunakan mata uang selain mata uang fungsional.

Dalam menentukan mata uang fungsional, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan (antara lain penerbitan instrumen utang dan ekuitas) dihasilkan;
- Mata uang dalam mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Perusahaan menggunakan Rupiah sebagai mata uang fungsional dan mata uang pelaporan.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia, sebagai berikut:

	2025	2024
1 USD	16.782	16.162
1 EUR	17.667	16.851

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.2 Foreign Currency Transactions and Balances

The Company adopted SFAS No. 221 “The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates”.

This SFAS sets up measurement and presentation currency of the Company in which the measurement currency should use a functional currency as the presentation currency may use a currency other than its functional currency.

In determining the functional currency of the Company the following factors should be considered:

- The currency in which funds from financing activities (i.e. issuing debt and equity instruments) are produced;*
- The currency in which receipts from operating activities are usually retained.*

The Company is using Indonesian Rupiah as the functional and reporting currency.

Transactions in foreign currencies are recorded into Rupiah using the exchange rate at the transaction incurred date. On every reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah using the middle rate set by Bank Indonesia on the last banking day of the period. Gains or losses are credited or charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income.

The exchange rates used are the middle exchange rate announced by Bank Indonesia, as follows:

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.3 Aset Keuangan

2.3.1 Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Perusahaan telah melakukan pemilihan tidak terbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

2.3.2 Pengukuran

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.3 Financial Assets

2.3.1 Classification

The Company classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

- *those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and*
- *those to be measured at amortized cost.*

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Company has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Company reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

2.3.2 Measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.3 Aset Keuangan (Lanjutan)

2.3.2 Pengukuran (Lanjutan)

Instrumen utang
Keuntungan atau kerugian dari investasi utang Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Perusahaan mengakui instrumen utangnya dalam kategori biaya diamortisasi sebagai berikut:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2.4 Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis forward-looking untuk seluruh saldo piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Selain untuk piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.3 Financial Assets (Continued)

2.3.2 Measurement (Continued)

*Debt instrument
Subsequent measurement of debt instruments depends on the Company's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. The Company recognized its debt instruments under amortized cost category as follows:*

- *Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*

2.4 Impairment of Financial Assets

The Company applies the "simplified approach" to measure the Expected Credit Loss ("ECL") which uses a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis for all trade receivables and contract assets without significant financing component. Other than trade receivables and contract assets without a significant financing component, the Company applies general model to ensure ECL.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.4 Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Definisi Gagal Bayar

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas Risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Untuk kas dan setara kas, Perusahaan menerapkan penyederhanaan risiko kredit rendah. Kemungkinan gagal bayar dan kerugian karena gagal bayar tersedia untuk umum dan dianggap sebagai investasi berisiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Perusahaan untuk mengukur ECL pada instrumen tersebut dalam basis 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak origination, penyisihan akan didasarkan pada ECL seumur hidup. Perusahaan menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat kredit terkemuka untuk menentukan apakah instrumen utang memiliki SICR dan untuk memperkirakan ECL.

Perusahaan menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.4 Impairment of Financial Assets (Continued)

Definition of Default

At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

When making the assessment, the Company consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

For cash and cash equivalents, the Company applies the low credit risk simplification. Default possibilities and losses due to default are publicly available and are considered low credit risk investments. It is the Company's policy to measure ECL on these instruments on a 12 months basis. However, if there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on ECL for life. Companies use ratings from leading credit rating agencies to determine whether a debt instrument has an SICR and to estimate ECL.

The Company considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- when there is a breach of financial covenants by the debtor; or*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.4 Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Definisi Gagal Bayar (Lanjutan)

Perusahaan menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan: (Lanjutan)

- informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Perusahaan, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan).
- terlepas dari analisis di atas, Perusahaan menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.
- Perusahaan menilai dengan basis *forward-looking* kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Kebijakan Penghapusan

Perusahaan menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau untuk hal piutang usaha, ketika jumlahnya sudah lebih dari 180 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas penagihan dalam prosedur pemulihan Perusahaan, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.4 Impairment of Financial Assets (Continued)

Definition of Default (Continued)

The Company considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable: (Continued)

- information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Company, in full (without taking into account any collateral held by the Company).
- irrespective of the above analysis, the Company considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Company has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.
- The Company assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortized cost and FVOCI. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

Write-off Policy

The Company writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, or in the case of trade accounts receivable, when the amounts are over 180 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Company's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.5 Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi.

2.6 Kas dan setara kas

Pada laporan arus kas Perusahaan, kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan cerukan. Pada laporan posisi keuangan Perusahaan, cerukan disajikan bersama sebagai pinjaman dalam liabilitas jangka pendek.

2.7 Piutang Usaha dan Piutang Non-usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.5 Derecognition of Financial Assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss.

2.6 Cash and cash equivalents

In the Company statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash in hand, deposits held at call with banks, other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less, and bank overdrafts. In the Company statement of financial position, bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities.

2.7 Trade and Non-trade Receivables

Trade receivables are amounts due from customers for merchandise sold or services performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non current assets.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Piutang non-usaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Perusahaan.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai. Lihat Catatan 5 untuk kebijakan akuntansi terkait penurunan nilai piutang.

2.8 Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Non-trade receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to related parties of the Company.

Trade and non-trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment. See Note 5 for accounting policies related to impairment receivables.

2.8 Transaction with Related Parties

Related party is a person or an Entity related to the Entity that is related to a reporting entity as follow:

- a. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
 - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.8 Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). (Lanjutan)

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.8 Transaction with Related Parties (Continued)

Related party is a person or an Entity related to the Entity that is related to a reporting entity as follow: (Continued)

- b. *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party.*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
 - v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*
 - vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*
 - vii. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).*
 - viii. *The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.8 Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan (Catatan 21).

2.9 Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya.

Uang muka adalah bagian dari kontrak karena dibayar atau diterima di muka untuk barang atau jasa. Uang muka dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan.

2.10 Aset Tetap

Perusahaan telah memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Umur Ekonomis/ Useful Lives (Tahun)/(Years)
Komputer	4
Software	4
Furnitur dan perlengkapan	4 – 8
Peralatan kantor	4 – 8

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Transaction with Related Parties (Continued)

The transaction was conducted on terms agreed by both parties, which terms may not be the same as other transactions conducted by parties who are not related.

All transactions and balances with significant related parties, whether or not conducted with the terms and conditions, as was done with the parties that have no relation to Company, have been disclosed in the relevant notes to the financial statements (Note 21).

2.9 Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over its useful life.

Advances are part of contractually due that is paid or received in advance for goods or services. Advances are recorded as asset on the statement of financial position.

2.10 Fixed Assets

The Company has chosen the cost method to measure their fixed assets.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses if any. Depreciation is computed using the straight-line method over the useful life of the assets. Estimated useful lives are as follows:

*Computer
Software
Furniture and fixtures
Office equipment*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.10 Aset Tetap (Lanjutan)

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mengkaji ulang nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya, dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2.11 Aset takberwujud

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian overhead yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.10 Fixed Assets (Continued)

At the end of each financial year, management review the residual values, useful lives and methods of depreciation, and if appropriate, adjusts prospectively.

The cost of repairs and maintenance is charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred; replacement or inspection costs are capitalized when incurred, and if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company, and the cost of the asset can be measured reliably.

The carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

2.11 Intangible assets

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognised as intangible assets.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.11 Aset takberwujud (Lanjutan)

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat selama enam (6) tahun.

2.12 Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Aset non-keuangan, pada setiap tanggal pelaporan ditentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika ada indikasi seperti itu, maka jumlah aset yang dapat dipulihkan diperkirakan. Jumlah yang dapat dipulihkan dari suatu aset atau CGU adalah semakin besar nilainya dalam penggunaan dan nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai nilai pakai, taksiran arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik untuk aset atau CGU. Untuk pengujian penurunan nilai, aset dikelompokkan bersama ke dalam kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar tidak tergantung dari arus kas masuk dari aset lain atau CGU.

Kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui sehubungan dengan CGU dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah tercatat dari goodwill yang dialokasikan ke CGU, dan kemudian untuk mengurangi jumlah tercatat dari aset lain dalam CGU secara pro rata.

Untuk aset lain, kerugian penurunan nilai hanya dibatalkan sejauh jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah tercatat yang akan ditentukan, setelah dikurangi penyusutan atau amortisasi, jika tidak ada kerugian penurunan nilai yang telah diakui.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.11 Intangible assets (Continued)

Computer software development costs are recognized as assets and are amortized over an estimated useful life of six (6) years.

2.12 Impairment of Non-financial Assets

Non-financial assets, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the asset's recoverable amount is estimated. The recoverable amount of an asset or CGU is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset or CGU. For impairment testing, assets are grouped together into the smallest Company of assets that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows of other assets or CGU.

Impairment losses are recognized in profit or loss. Impairment losses recognized in respect of CGU are allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the CGU, and then to reduce the carrying amounts of the other assets in the CGU on a pro rata basis.

For other assets, an impairment loss is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.13 Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Perusahaan menyewa berbagai aset tetap. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 1 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi.

Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri Namun, untuk sewa real estat di mana Perusahaan merupakan penyewa, ia telah memilih untuk tidak memisahkan komponen sewa dan non-sewa dan sebagai gantinya memperhitungkannya sebagai komponen sewa tunggal.

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Perusahaan. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode. Aset hak pakai didepresiasi selama periode yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa sewa dengan metode garis lurus.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.13 Leases

Determining whether an agreement is, or contains, a lease is based on the substance of the agreement itself and assessing whether fulfillment of the agreement depends on the use of certain assets or assets, and whether the agreement conveys the right to use the assets.

The Company leases various fixed assets. Lease contracts are usually drawn up for a fixed period of 1 years but may have extension options.

The contract may contain both lease and non-lease components based on stand-alone relative prices. However, for real estate leases in which the Company is the lessee, it has chosen not to separate the lease and non-lease components and counts them instead as the single rental component.

Lease terms are negotiated individually and contain a variety of different terms and conditions. The lease agreement does not impose any agreement other than collateral for borrowing purposes.

Leases are recognized as right of use assets and related liabilities on the date on which the leased assets are available for use by the Company. Each lease payment is allocated between a liability and finance cost. Finance costs are charged to profit or loss over the lease term, resulting in a constant periodic interest rate on the remaining balance of the liability for each period. Rights of use assets are depreciated over the shorter period between the useful lives of the assets and the lease terms using the straight-line method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.13 Sewa (Lanjutan)

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

1. Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
2. Pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
3. Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
4. Harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
5. Pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Perusahaan, suku bunga pinjaman incremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.13 Leases (Continued)

Assets and liabilities arising from leases are initially measured on the present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- 1. Fixed payments (including fixed payments in substance), less lease incentive receivables;*
- 2. Variable lease payments, which are based on an index or rate, are initially measured using an index or rate at the start date;*
- 3. The amount that the lessee is expected to pay based on a guaranteed residual value;*
- 4. The exercise price of the purchase option if the lessee is confident enough to exercise the option; and*
- 5. Payment of penalty for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising the option.*

Lease payments that must be made under certain extension options are also included in the measurement of the liability.

Lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be immediately determined, which is generally the case with leases in the Company, the incremental loan interest rate of the lessee is used, namely the rate that must be paid by the lessee to borrow the funds needed to acquire an asset with a value equal to the asset used in similar economic environment with similar terms and conditions.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.13 Sewa (Lanjutan)

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Perusahaan:

1. Jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
2. Menggunakan pendekatan build-up yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit; dan
3. Membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

Perusahaan dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

1. Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
2. Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
3. Biaya langsung awal; dan
4. Biaya restorasi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.13 Leases (Continued)

To determine the incremental borrowing rate, the Company:

1. Where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;
2. Use a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk; and
3. Makes adjustments specific to the lease, eg term, country, currency and security.

The Company is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

1. The amount of the initial measurement of lease liability;
2. Any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received makes adjustments specific to the lease, eg term, country, currency and security;
3. Any initial direct costs; and
4. Restoration costs.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.13 Sewa (Lanjutan)

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Perusahaan cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya. Sementara Perusahaan menilai kembali tanah dan bangunannya yang ada di dalam properti, gedung, dan peralatan, Perusahaan memilih untuk tidak melakukannya untuk bangunan hak guna yang dimiliki oleh Perusahaan.

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang.

Opsi ekstensi dan terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Perusahaan. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Jaminan nilai residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Perusahaan terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan operasi sewa dimana Perusahaan bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.13 Leases (Continued)

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Company is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying assets's useful life. While the Company revalues its land and buildings that are presented within fixed assets, it has chosen not to do so for the right-of-use buildings held by the Company.

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of fixed assets leases across the Company. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Company and not by the respective lessor.

Residual value guarantees

To optimize lease costs during the contract period, the Company sometimes provides residual value guarantees in relation to equipment leases.

Lease income from operating leases where the Company is a lessor is recognised in income on a straight-line basis over the lease term.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.14 Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban diakui berdasarkan metode akrual. Pendapatan diperoleh dari penjualan produk dan atau jasa setelah dikurangi dengan retur penjualan. Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan, pemberian jasa dan penyerahan barang dan penerbitan faktur, sedangkan beban diakui pada saat terjadinya.

Perusahaan telah menerapkan PSAK 115 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Perusahaan memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.14 Revenue and Expenses Recognition

Revenues and expenses are recognized on the accrual basis. Revenue is derived from the sale of products and or services after deducting the sales returns. Revenue is recognized upon the occurrence of the sale transaction, the provision of services and the delivery of goods and the issuance of invoices, while expenses are recognized as incurred.

The Company has applied SFAS 115, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contracts with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost-plus margin
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.14 Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Perusahaan memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima.

Kriteria pengakuan pendapatan juga harus dipenuhi yaitu pada saat telah terjadi penyaluran.

Pendapatan komisi dari kegiatan operasi diakui pada saat terjadinya transaksi.

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.14 Revenue and Expenses Recognition (Continued)

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

Revenue is recognized when it is probable that economic benefits to be obtained by the Company and the amount can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received.

The criteria for recognizing income must also be fulfilled, namely when there is a disbursement.

Commission fee from operation activities is recognized when transactions are already expected.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.15 Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontinjen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan Perusahaan lainnya terdiri atas utang lain-lain, dan biaya masih harus dibayar.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Utang usaha lainnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.15 Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as either financial liabilities “at FVTPL” or “at amortized cost” using the effective interest method.

Financial liabilities at amortized cost.

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as of FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Other financial liabilities of the Company comprise of other payables, and accrued expenses.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Other payables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.16 Pajak Penghasilan Kini dan Tangguhan

Pajak Kini

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Perusahaan untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Perusahaan yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.16 Current and deferred income tax

Current Tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Company's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Company supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized.

Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.16 Pajak Penghasilan Kini dan Tangguhan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode balance sheet untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.16 Current and deferred income tax (Continued)

Deferred Tax (Continued)

Deferred income tax is recognized, using the balance sheet method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.17 Imbalan Kerja

a. Imbalan Kerja Jangka Pendek

Liabilitas diakui atas manfaat yang menjadi hak karyawan sehubungan dengan upah dan gaji, cuti tahunan dan cuti sakit dalam periode di mana jasa terkait diserahkan, sebesar jumlah yang tidak didiskontokan dari pembayaran manfaat ekspektasian sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Hak karyawan atas cuti tahunan diakui ketika karyawan mendapat hak. Provisi dibuat untuk liabilitas cuti tahunan akibat jasa yang diserahkan oleh karyawan sampai tanggal periode pelaporan.

b. Imbalan Pascakerja Program Imbalan Pasti

Pada bulan April 2023, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 219: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 Employee Benefits. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19).

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Perusahaan juga memberikan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Perusahaan menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.17 Employee Benefits

a. Short-term Employee Benefits

A liability is recognized for benefits accruing to employees in respect of wages and salaries, annual leave and sick leave in the period the related service is rendered at the undiscounted amount of the benefit expected to be paid in exchange for that service.

Employee entitlements to annual leave are recognized when they accrue to employees. A provision is made for the estimated liability for annual leave as a result of services rendered by employees up to the end of the reporting period.

b. Defined Benefit Plans

In April 2023, DSAK IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 219: Imbalan Kerja which was adopted from IAS 19 Employee Benefits. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19).

The Company established a defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. In addition, the Company also provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 6 of year 2023 on Job Creation (Job Creation Law). For normal pension scheme, the Company calculates and recognizes the higher of the benefits under the Job Creation Law and those under such pension plan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.17 Imbalan Kerja (Lanjutan)

b. Imbalan Pascakerja Program Imbalan Pasti

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode projected unit credit dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), diakui langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam “saldo laba”.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amandemen program atau kurtailmen, atau ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dibagi menjadi tiga kategori:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto; dan
- Pengukuran Kembali

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.17 Employee Benefits (Continued)

b. Defined Benefit Plans

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement comprising actuarial gains and losses, the effect of the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements recognized in other comprehensive income are reflected immediately in “retained earnings”.

Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Company recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier. Net interest is calculated by applying a discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are into three categories:

- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)*
- *Net interest expense or income; and*
- *Remeasurement*

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Company’s defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.17 Imbalan Kerja (Lanjutan)

c. Pesangon

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik penawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

2.18 Modal Saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Tambahan biaya yang secara langsung berhubungan dengan penerbitan modal saham diakui sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi efek pajak apapun.

2.19 Modal Saham Subskripsi

Modal saham Subskripsi adalah sebagian dari modal dasar yang telah ditempatkan tetapi belum disetor oleh pemegang saham sehingga masih belum ditempatkan. Modal saham yang ditempatkan dilaporkan dikurangi piutang pemesanan yang tidak dapat tertagih saat ini.

2.20 Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.17 Employee Benefits (Continued)

c. Termination

A liability for a termination benefit is recognized at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognizes any related restructuring costs.

2.18 Share Capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares are recognized as a deduction from equity, net of any tax effects.

2.19 Subscribed Shares Capital

Subscribed share capital is a portion of authorized share capital that has been subscribed but not yet paid by the shareholder therefore still unissued. The subscribed share capital is reported minus subscription receivable not collectible currently.

2.20 Provision

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of money is material).

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2.21 Kontijensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Namun pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui di laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika adanya kemungkinan arus masuk dari manfaat ekonomi.

2.22 Transaksi Off Balance Sheet

Pinjaman yang disalurkan dari aktivitas Perusahaan sebagai perantara antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman melalui platform pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh Perusahaan dicatat di luar neraca karena segala risiko kredit atau gagal bayar ditanggung oleh pemberi pinjaman.

2.23 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa setelah tanggal neraca yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan jika material. Peristiwa setelah tanggal neraca yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.21 Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

2.22 Off Balance Sheet Transactions

Loans disbursed in relation with the Company's activities as agent who connect the borrowers of loans with the lenders through online peer to peer platform provided by the Company are recorded off balance sheets because all the credit risk or risk of default is fully borne by the lenders.

2.23 Event After Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Company's positions at the reporting date (adjusting events) are reflected in the financial statements when material. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

3.1 Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Perusahaan membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

a. Penggunaan Asumsi Kelangsungan Usaha

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perusahaan, selain yang melibatkan estimasi, manajemen telah menyusun laporan keuangan dengan asumsi bahwa Perusahaan akan dapat mempertahankan kelangsungan usaha dalam operasinya di tahun mendatang, yang merupakan pertimbangan penting yang berdampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Penilaian asumsi kelangsungan usaha melibatkan pengambilan keputusan oleh manajemen, pada titik waktu tertentu, tentang hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi yang secara inheren tidak pasti.

Manajemen Perusahaan mempertimbangkan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan peristiwa atau kondisi utama, yang dapat menimbulkan risiko bisnis, yang secara individual atau kolektif dapat menimbulkan keraguan signifikan atas asumsi kelangsungan usaha.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

In applying the accounting policies of the Company, as disclosed in Note 2 to the financial statements, management should make estimates, judgment, and the assumptions on the carrying value of assets and liabilities that are not available by other sources. Estimates and assumptions are based on historical experience and other factors considered relevant.

3.1 Critical accounting estimates and assumptions

The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

a. The Use of Going Concern Assumption

In the process of applying the Company's accounting policies, apart from those involving estimations, management has prepared the financial statements on the assumption that the Company will be able to operate as a going concern in the coming years, which is a critical judgement that has the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements. The assessment of the going concern assumption involves making a judgement by the management, at a particular point of time, about the future outcome of events or conditions which are inherently uncertain.

The Company's management considers that the Company has the capability to continue as a going concern and the major events or conditions, which may give rise to business risks, that individually or collectively may cast significant doubt upon the going concern.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**3.1 Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang
Penting (Lanjutan)**

b. Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

c. Imbalan Pensiun

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa mendatang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 13.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (Continued)**

**3.1 Critical accounting estimates and
assumptions (Continued)**

b. Determination of Functional Currency

The functional currencies of the Company are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the management assessment, the Company's functional currency is Indonesian Rupiah.

c. Pension benefits

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 13.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**3.2 Pertimbangan Penting dalam Penentuan
Kebijakan Akuntansi Entitas**

a. Estimasi Masa Sewa

Dalam mengestimasi masa sewa dari masing-masing perjanjian sewa, manajemen mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomi untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk perubahan fakta atau keadaan yang diekspektasi dari tanggal permulaan hingga tanggal eksekusi opsi. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya diperhitungkan dalam masa sewa jika sewa cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

b. Perhitungan Cadangan Kerugian

Saat mengukur ECL, Perusahaan menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang Perusahaan berjumlah Nihil.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (Continued)**

**3.2 Critical Judgements in Applying the Entity's
Accounting Policies**

a. Estimation of lease term

When estimating the lease term of the respective lease arrangement, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option, including any expected changes in facts and circumstances from the commencement date until the exercise date of the option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

b. Calculation of Expected Credit Loss

When measuring ECL, the Company uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

As of December 31, 2025 and 2024, allowance for expected credit loss on the Company receivables is amounting to Nil.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**3.2 Pertimbangan Penting dalam Penentuan
Kebijakan Akuntansi Entitas (Lanjutan)**

c. Estimasi umur manfaat atas aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap, dan aset takberwujud Perusahaan ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 9.

d. Penurunan nilai atas aset tetap dan aset tidak berwujud

PSAK mensyaratkan bahwa penelaahan atas penurunan nilai atas aset tetap dan tidak berwujud harus dilakukan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Penentuan jumlah yang dapat diperoleh kembali membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan, yang akan dihasilkan dari penggunaan secara berkelanjutan dan hasil akhir dari aset tersebut.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (Continued)**

**3.2 Critical Judgements in Applying the
Entity's Accounting Policies (Continued)**

c. Estimating useful lives of fixed assets

The useful life of each item of the Company's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation and amortization expense, respectively, and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying values of fixed assets are disclosed in Note 9.

d. Impairment of fixed assets and intangible assets

SFAS requires that an impairment review be performed on fixed assets and intangible assets events or changes in when circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Determining the net recoverable amount of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**d. Penurunan nilai atas aset tetap dan aset tidak
berwujud (Lanjutan)**

Sementara itu, manajemen yakin bahwa asumsi yang digunakan dalam menghitung estimasi nilai wajar yang tercermin di dalam laporan keuangan adalah sudah sesuai dan wajar. Maka perubahan yang signifikan dalam asumsi ini dapat secara material mempengaruhi penilaian atas jumlah yang dapat diperoleh kembali dan kerugian atas penurunan nilai yang dihasilkan bisa memiliki dampak yang material terhadap hasil usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada penurunan nilai yang diakui dalam aset tetap dan aset tidak berwujud Perusahaan (Catatan 9).

**e. Penentuan Nilai Wajar atas Instrumen
Keuangan**

Manajemen menggunakan teknik penilaian, termasuk model diskonto arus kas dalam mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan dimana penawaran pasar aktif tidak tersedia.

Dalam menerapkan teknik penilaian, manajemen memanfaatkan input pasar semaksimal mungkin, dan menggunakan estimasi dan asumsi, yang sejauh mungkin, sesuai dengan data yang dapat diobservasi oleh pelaku pasar akan digunakan di dalam penentuan harga instrumen. Dalam hal data yang berlaku tidak dapat dicermati, maka manajemen akan menggunakan estimasi terbaik dimana asumsi akan digunakan oleh pelaku pasar. Perkiraan ini mungkin berbeda dengan harga sebenarnya yang akan dicapai dalam transaksi wajar pada tanggal pelaporan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (Continued)**

**d. Impairment of fixed assets and intangible
assets (Continued)**

While it is believed that the assumptions used in the estimation of fair values reflected in the financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of recoverable amounts and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of operations.

As of December 31, 2025 and 2024, there was no allowance for impairment losses recognized on the Company fixed assets and intangible assets (Note 9).

**e. Determining Fair Value of Financial
Instruments**

Management uses valuation techniques, including the discounted cash flow model in measuring the fair value of financial instruments where active market quotes are not available.

In applying the valuation techniques, management makes maximum use of market inputs, and uses estimates and assumptions that are, as far as possible, consistent with observable data that market participants would use in pricing the instrument. Where applicable data is not observable, management uses its best estimate about the assumptions that market participants would make. These estimates may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**3.2 Pertimbangan Penting dalam Penentuan
Kebijakan Akuntansi Entitas (Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Penentuan provisi untuk pajak penghasilan badan memerlukan pertimbangan yang signifikan dari manajemen. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Perusahaan mengakui liabilitas atas masalah pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak penghasilan badan akan terutang. Jika hasil pajak final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dibuat.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (Continued)**

**3.2 Critical Judgements in Applying the Entity's
Accounting Policies (Continued)**

f. Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Determining provision for corporate income tax requires significant judgment by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amount that are initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**3.2 Pertimbangan Penting dalam Penentuan
Kebijakan Akuntansi Entitas (Lanjutan)**

g. Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Perusahaan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai aset tersebut sebesar mungkin yang tidak dapat direalisasikan, dimana ketersediaan penghasilan kena pajak memungkinkan untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Perusahaan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dikurangkan berdasarkan tingkat dan waktu dari taksiran penghasilan kena pajak untuk periode pelaporan berikutnya. Estimasi tersebut didasarkan pada pencapaian Perusahaan di masa lalu dan ekspektasi masa depan terhadap pendapatan dan beban, serta dengan strategi perencanaan pajak di masa depan. Namun tidak ada kepastian bahwa Perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

h. Provisi dan Kontinjensi

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan menjalankan sesuai ketentuan untuk kewajiban hukum maupun konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan pada ketentuan dan kontinjensi. Dalam pengakuan dan pengukuran ketentuan, manajemen mengambil pertimbangan risiko dan ketidakpastian.

Perusahaan tidak mengakui provisi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (Continued)**

**3.2 Critical Judgements in Applying the Entity's
Accounting Policies (Continued)**

g. Realization of Deferred Tax Assets

The Company conducted a review of the carrying amount of deferred tax assets at each end of reporting period and reduce the value of such assets by as much as possible which cannot be realized, where the availability of taxable income allow to use all or part of the deferred tax assets. The Company's review on the recognition of deferred tax assets for deductible temporary difference can be deductible based on the level and timing from the estimated taxable income for the next reporting period. The estimation is based on the achievement of the Company in the past and future expectation toward income and expenses, as well as with the tax planning strategies in the future. But there is no certainty that the Company can generate sufficient taxable income to allow to use part or all of these deferred tax assets

h. Provisions and Contingencies

In the ordinary course of business, the Company sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties into account.

The Company has not recognized any provision as of December 31, 2025 and 2024.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2025	2024	
Kas	-	87.972	Cash on hand
Bank			Cash in bank
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.160.989.897	55.226.840	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	733.366.416	495.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	951.449	1.449	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub jumlah	2.895.307.762	55.723.289	Subtotal
Deposito			Time Deposit
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8.045.175.000	5.104.530.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Sub jumlah	8.045.175.000	5.104.530.000	Subtotal
Jumlah	10.940.482.762	5.160.341.261	Total

Kas di bank tidak dibatasi dan dapat ditarik setiap saat.

Cash in banks are unrestricted and can be withdrawn at any time.

Rekening di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

All accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank.

Jangka waktu deposito adalah 1 sampai 3 bulan dengan tingkat bunga 2,5% per tahun.

The deposit term is 1 to 3 months with an interest rate of 2,5% per year.

Perusahaan tidak mempunyai hubungan berelasi dengan bank dimana kas dan setara kas ditempatkan.

The Company does not have a related party relationship with the banks where cash and cash equivalents are placed.

Eksposur maksimum terhadap resiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari laporan aset di Catatan 22.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of these financial asset is disclosed in Note 22.

5. PIUTANG USAHA

5. ACCOUNT RECEIVABLES

Jumlah piutang usaha berdasarkan pelanggan:

Details of account receivables balance by customers:

	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Maybright Asia Pacific Pte Ltd	220.397.855	-	Maybright Asia Pacific Pte Ltd
PT GoTyme Capital Indonesia	142.346.382	90.180.124	PT GoTyme Capital Indonesia
PT Carbay Services Indonesia	113.846.040	-	PT Carbay Services Indonesia
PT Carenow Indonesia Sejahtera	78.206.652	91.088.249	PT Carenow Indonesia Sejahtera
Aspire Financial Technologies Pte Ltd	-	114.151.179	Aspire Financial Technologies Pte Ltd
EII Global Capital Limited	-	213.493.310	EII Global Capital Limited
PT Dibayarin Kredit Indonesia	-	5.550.000	PT Dibayarin Kredit Indonesia
PT Cipta Fasilitas Satu	616.772	3.786.764	PT Cipta Fasilitas Satu
Crediling Digital Economy Fund	-	3.350.022	Crediling Digital Economy Fund
Lain -lain dibawah satu juta	-	2.404.357	Others under one million
Jumlah	555.413.701	524.004.005	Total

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Jumlah piutang usaha berdasarkan pelanggan:
(Lanjutan)

	2025	2024
Dikurangi: Penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang	-	-
Jumlah pihak ketiga	555.413.701	524.004.005
Pihak berelasi		
Gateway Indonesia Pte.Ltd.	810.724.848	3.375.409.013
Jumlah	810.724.848	3.375.409.013
Dikurangi: Penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang	-	-
Jumlah piutang usaha	1.366.138.549	3.899.413.018

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2025	2024
1 sampai 30 hari	924.570.888	3.716.374.404
31 sampai 90 hari	422.070.871	122.373.781
Diatas 90 hari	19.496.790	60.664.833
Jumlah	1.366.138.549	3.899.413.018

Perusahaan tidak membentuk penyisihan atas kerugian penurunan nilai karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang dapat sepenuhnya tertagih.

Karena jatuh temponya yang pendek, jumlah tercatat piutang usaha kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

Eksposure maksimum terhadap resiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari laporan aset di Catatan 22.

5. ACCOUNT RECEIVABLES (Continued)

Details of account receivables balance by customers: (Continued)

Less: Provision for expected credit loss
Total third parties
Related parties
Gateway Indonesia Pte.Ltd.
Total
Less: Provision for expected credit loss
Total account receivables

Aging of account receivables is as follows:

1 to 30 days
31 to 90 days
Up to 90 days
Total

The Company did not provide any provision for expected credit losses because the management believes that all receivables are fully collectible.

Due to the short-term nature of trade receivables, their carrying amount approximates their fair values.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of these financial asset is disclosed in Note 22.

6. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

	2025	2024
KITAS, VISA, dan Imigrasi Perizinan	49.914.950	48.880.050
Uang Muka Pembelian	25.528.871	4.350.000
Uang Muka Karyawan	3.071.000	27.065.710
Asuransi dibayar di muka	1.999.982	-
	-	467.769
Jumlah	80.514.803	80.763.529

KITAS, VISA, and Immigration Licenses
Purchase Advance
Employee Advance
Prepaid insurance

Total

7. ASET LANCAR LAINNYA

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Piutang lain-lain	673.874.573	546.313.595	Other Receivables
Jumlah	673.874.573	546.313.595	Total

Piutang lain-lain merupakan piutang yang diberikan kepada karyawan, direksi dan tagihan kliring Perusahaan.

Eksposure maksimum terhadap resiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari laporan aset di Catatan 22.

7. OTHER CURRENT ASSETS

Other receivables represents amounts given to employee, directors and clearing bills of the Company.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of these financial asset as disclosed in Note 22.

8. ASET TAKBERWUJUD

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan perangkat lunak dan sistem dalam pengembangan secara internal oleh perusahaan masing-masing sebesar Rp2.000.000.000 dan Nihil.

8. INTANGIBLE ASSETS

For the years ended December 31, 2025 and 2024, this account represents internally developed software and systems under development amounting to Rp2,000,000,000 and Nil, respectively.

	<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Penambahan/ Addition</u>	<u>Pengurangan/ Disposal</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>	
Harga perolehan					Acquisition cost
Sistem <i>software</i>	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	System software
Jumlah harga perolehan	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Sistem <i>software</i>	-	-	-	-	System software
Jumlah akumulasi penyusutan	-	-	-	-	
Nilai buku netto	-	-	-	2.000.000.000	Net book value

9. ASET TETAP

9. FIXED ASSETS

	<u>2025</u>				
	<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Penambahan/ Addition</u>	<u>Pengurangan/ Disposal</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>	
Harga perolehan					Acquisition cost
Komputer	606.266.826	219.920.854	(81.929.000)	744.258.680	Computer
Software	159.603.717	-	-	159.603.717	Software
Furniture dan perlengkapan	184.328.157	2.664.000	(1.264.001)	185.728.156	Furniture and fixtures
Peralatan kantor	199.665.792	1.182.860	-	200.848.652	Office equipment
Jumlah harga perolehan	1.149.864.492	223.767.714	(83.193.001)	1.290.439.205	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Komputer	460.136.344	106.124.495	(81.929.000)	484.331.839	Computer
Software	156.561.707	5.880.128	-	162.441.835	Software
Furniture dan perlengkapan	143.316.574	19.074.865	(1.000.000)	161.391.439	Furniture and fixtures
Peralatan kantor	181.404.473	13.518.308	-	194.922.782	Office equipment
Jumlah akumulasi penyusutan	941.419.098	144.597.797	(82.929.000)	1.003.087.895	Total accumulated Depreciation
Nilai buku netto	208.445.394			287.351.310	Net book value

9. ASET TETAP (Lanjutan)

9. FIXED ASSETS (Continued)

	2024				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Disposal</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga perolehan					Acquisition cost
Komputer	578.795.046	27.471.780	-	606.266.826	Computer
Software	159.603.717	-	-	159.603.717	Software
Furniture dan perlengkapan	172.299.997	21.938.610	(9.910.450)	184.328.157	Furniture and fixtures
Peralatan kantor	198.389.262	1.276.530	-	199.665.792	Office equipment
Total harga perolehan	1.109.088.022	50.686.920	(9.910.450)	1.149.864.492	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Komputer	379.717.184	80.419.160	-	460.136.344	Computer
Software	149.448.299	7.113.408	-	156.561.707	Software
Furniture dan perlengkapan	123.999.107	25.378.175	(6.060.708)	143.316.574	Furniture and fixtures
Peralatan kantor	158.608.131	22.796.342	-	181.404.473	Office equipment
Jumlah akumulasi penyusutan	811.772.722	135.707.085	(6.060.708)	941.419.098	Total accumulated depreciation
Nilai buku netto	297.315.300			208.445.394	Net book value
Kerugian penghapusan aset		2025	2024		Loss on assets disposal
Nilai buku		264.001	3.849.742		Net-book value
Kas dari penjualan aset		-	-		Cash proceeds from sales
Kerugian penghapusan aset		264.001	3.849.742		Loss on disposal assets

Beban penyusutan selama 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp144.597.797 dan Rp135.707.085 (Catatan 18).

Depreciation expense during the year ending December 31, 2025 and 2024 are Rp144,597,797 and Rp135,707,085, respectively (Note 18).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of fixed assets as of December 31, 2025 and 2024.

Perusahaan tidak memiliki aset tetap yang dijaminkan untuk memperoleh pinjaman pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Company does not have fixed assets pledged as collateral to obtain loans as of December 31, 2025 and 2024.

10. SEWA GUNA USAHA

10. RIGHT OF USE ASSET

	2025				
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balances</i>	
Harga Perolehan					Acquisition cost
Bangunan	714.154.192	749.448.925	(714.154.166)	749.448.951	Building
Jumlah	714.154.192	749.448.925	(714.154.166)	749.448.951	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	535.615.658	740.625.237	(714.154.166)	(562.086.729)	Building
Jumlah	535.615.658	740.625.237	(714.154.166)	(562.086.729)	Total
Nilai buku bersih	178.538.534			187.362.222	Net book value

10. SEWA GUNA USAHA (Lanjutan)

10. RIGHT OF USE ASSET (Continued)

	<u>2024</u>					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyesuaian <i>/Adjustment</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balances</i>	
Harga Perolehan						Acquisition cost
Bangunan	1.537.382.172	-	757.938.779	(65.289.201)	714.154.192	Building
Jumlah	1.537.382.172	-	757.938.779	(65.289.201)	714.154.192	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	505.292.535	788.261.902	757.938.779	-	535.615.658	Building
Jumlah	505.292.535	788.261.902	757.938.779	-	535.615.658	Total
Nilai buku bersih	1.032.089.637				178.538.534	Net book value

Jumlah uang jaminan atas sewa gedung yang sudah dibayarkan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 2025 dan 2024 adalah Rp195.750.726 dan Rp154.495.836.

The amount of security deposits for building leases that has been paid by the Company for the years ended 2025 and 2024 are Rp195,750,726 and Rp154,495,836, respectively.

11. UANG JAMINAN

11. SECURITY DEPOSITS

Akun ini terdiri dari uang jaminan atas sewa gedung dan kartu kredit. Nilai aset lain-lain untuk tahun-tahun yang berakhir 2025 dan 2024 adalah Rp305.750.725 dan Rp264.636.378.

This account consists of security deposits of building leases and credit cards. The values of other assets for the years ended 2025 and 2024 are Rp305,750,725 and Rp264,636,378, respectively.

Eksposur maksimum terhadap resiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari laporan aset di Catatan 22.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of these financial asset as disclosed in Note 22.

12. UTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

12. OTHER PAYABLES – THIRD PARTIES

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Utang kepada vendor	328.750.712	442.180.654	Due to vendors
Kartu kredit	6.717.235	67.385.196	Credit cards
Lain-lain	2.134.244	2.963.848	Others
Jumlah	337.602.191	512.529.697	Total

Utang lain-lain pihak ketiga terdiri dari utang ke vendor, pemakaian kartu kredit dan lainnya.

Other third party debts consist of due to vendors, credit card and others.

Eksposur maksimum terhadap resiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari laporan liabilitas di Catatan 22.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of these financial liability as disclosed in Note 22.

13. KEWAJIBAN IMBALAN PASCAKERJA

Perusahaan membentuk liabilitas imbalan pasca kerja didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen yaitu PT Padma Radya Aktuaria dalam laporannya Nomor: 359/LAP/KKA/I/26 tanggal 30 Januari 2026 untuk nilai liabilitas aktuaris per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2024	
Tingkat bunga	6,75%	7,25%	Discount rate per annum
Tingkat proyeksi kenaikan gaji per Tahun	5,00%	5,00%	Projected salary increase rate per annum
Tabel kematian	100% TMI4	100% TMI4	Mortality rate
Usia pensiun normal	55 Tahun/Years	55 Tahun/Years	Normal pension age
Metode	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Method
Rata-rata tertimbang	6,755%		Weighted average

Rekonsiliasi beban manfaat karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	410.244.731	344.508.460	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	-	Past service cost
Biaya bunga	62.862.000	36.357.081	Interest cost
Penyesuaian karena perubahan metode atribusi	-	-	Adjustment due to change in attribution method
Jumlah beban kewajiban imbalan pasca kerja diakui dalam laba rugi (Catatan 17)	473.106.731	380.865.541	Total post-employment benefit obligation expense recognized in the statement of profit or loss (Note 17)

Rekonsiliasi pengukuran kembali kerugian/(keuntungan) aktuarial yang diakui di laporan penghasilan komprehensif lainnya sebagai berikut:

	2025	2024	
Pengukuran kembali	(158.852.468)	(29.494.122)	Re-measurement
Jumlah laba aktuarial atas kewajiban imbalan pasca kerja diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(158.852.468)	(29.494.122)	Total actuarial gain on post-employment benefit obligation recognized in the other comprehensive income

13. POST EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION

The Company established a post-employment benefit obligation based on calculations performed by an independent actuary, PT Padma Radya Aktuaria in its report No. 359/LAP/KKA/I/26 dated January 30, 2026 for actuarial liability amounts as of December 31, 2025 and 2024 as follows:

Reconciliation of employee benefit expense recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

Reconciliation of remeasurement of actuarial loss/(gain) recognized in the other comprehensive income is as follows:

13. KEWAJIBAN IMBALAN PASCAKERJA
(Lanjutan)

Perubahan nilai kini imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo awal nilai kini liabilitas imbalan kerja	880.465.783	529.094.364
Penyesuaian karena perubahan metode atribusi		
Biaya jasa kini	410.244.731	344.508.460
Biaya jasa lalu	-	-
Biaya bunga	62.862.000	36.357.081
Keuntungan aktuarial	(158.852.468)	(29.494.122)
Saldo akhir nilai kini liabilitas imbalan kerja	1.194.720.046	880.465.783

Analisis sensitivitas pada asumsi-asumsi akturia utama untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
NKKIP akhir periode	1.194.720.046	880.465.783
Tingkat diskonto +1%	1.100.496.711	795.671.932
Tingkat diskonto -1%	1.303.718.002	979.549.062
NKKIP akhir periode	1.194.720.046	880.465.783
Tingkat kenaikan upah +1%	1.308.646.431	987.789.705
Tingkat kenaikan upah -1%	1.094.799.558	787.750.162

Jatuh tempo kewajiban aset dana manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Antara Tahun ke-1 sampai Tahun ke-2	84.923.291	34.109.349
Antara 2 dan 5 tahun	1.244.271.899	1.065.374.295
Antara 6 dan 10 tahun	521.116.820	427.532.722
Di atas 10 tahun	15.678.321.711	30.876.274.640

14. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Notaris No. 49 tanggal 24 Juli 2025 dari Aurora Wina Muthmainnah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0196621 tanggal 25 Juli 2025, para pemegang saham sepakat untuk mengubah susunan pemegang saham per 31 Desember 2025.

13. POST EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION
(Continued)

Movement in the present value of employee benefit obligation were as follows:

	2025	2024
Beginning balance of present value of employee benefit obligation	880.465.783	529.094.364
Adjustment due to change in attribution method		
Current service cost	410.244.731	344.508.460
Past service cost	-	-
Interest cost	62.862.000	36.357.081
Actuarial gain	(158.852.468)	(29.494.122)
Ending balance of present value of employee benefit obligation	1.194.720.046	880.465.783

Sensitivity analysis on significant actuarial assumptions for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024
PVDBO ending of period	1.194.720.046	880.465.783
Discount rate +1%	1.100.496.711	795.671.932
Discount rate -1%	1.303.718.002	979.549.062
PVDBO ending of period	1.194.720.046	880.465.783
Salary increase rate +1%	1.308.646.431	987.789.705
Salary increase rate -1%	1.094.799.558	787.750.162

The maturity of defined benefit plan obligation as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024
Between Year 1 – Year 2	84.923.291	34.109.349
Between 2 and 5 years	1.244.271.899	1.065.374.295
Between 6 and 10 years	521.116.820	427.532.722
Beyond 10 years	15.678.321.711	30.876.274.640

14. SHARE CAPITAL

Based on Notarial Deed No. 49 dated July 24, 2025 of Aurora Wina Muthmainnah, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta Timur and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in the letter No. AHU-AH.01.03-0196621 dated July 25, 2025, the shareholders agreed to changed shareholders composition as of December 31, 2025.

14. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Pemegang saham dan kepemilikan sahamnya masing-masing per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

14. SHARE CAPITAL (Continued)

The shareholders and their respective share ownerships as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

31 Desember 2025/ December 31, 2025			
Pemegang Saham/ Shareholders	% Kepemilikan/ % Ownership	Lembar saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount
<i>Digital Micro Pte Ltd.</i>	59,47%	899.826	11.868.704.940
<i>Finfra Tech Holdings Pte Ltd</i>	21,74%	328.950	4.338.850.500
<i>Ihwansyah Arrafi Udaya</i>	14,33%	216.855	2.860.317.450
<i>PT Infra Teknologi Indonesia</i>	4,46%	67.500	890.325.000
Jumlah/Total	100,00%	1.513.131	19.958.197.890

31 Desember 2024/ December 31, 2024			
Pemegang Saham/ Shareholders	% Kepemilikan/ % Ownership	Lembar saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount
<i>Digital Micro Pte Ltd.</i>	85,00%	899.826	11.868.704.940
<i>Ihwansyah Arrafi Udaya</i>	15,00%	158.805	2.094.637.950
Jumlah/Total	100,00%	1.058.631	13.963.342.890

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Selain itu, Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Perusahaan pada RUPST.

Modal Saham Subskripsi

Berdasarkan Surat Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-1053/PL.021/2025, tanggal 16 Oktober 2025 bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui dan menambahkan modal sebesar Rp4.338.850.000 dimiliki oleh Finfra Tech Holdings Pte. Ltd. dan Rp765.679.500 dimiliki oleh Ihwansyah Arrafi Udaya. Atas setoran modal tersebut sudah diakui sebagai tambahan modal Perusahaan didalam Akta pada tanggal 1 Juli 2025.

Capital Management

The primary objective of capital management is to ensure that The Company maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

In addition, the Company is also required by the Corporate Law No. 40 effective August 16, 2007 to contribute to and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considered by the Company at the Annual General Meeting.

Subscribed Shares Capital

Based on the Financial Services Authority (OJK) Decree number S-1053/PL.021/2025, dated October 16, 2025, the Financial Services Authority (OJK) has approved an additional capital of Rp4,338,850,000 held by Finfra Tech Holdings Pte. Ltd. and Rp765,679,500 held by Ihwansyah Arrafi Udaya. These capital contributions have been recognized as additional capital of the Company in the Deed dated July 1, 2025.

14. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Modal Saham Subskripsi (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-1117/PL.021/2025, tanggal 29 Oktober 2025 bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui dan menambahkan modal sebesar Rp890.325.000 dimiliki oleh PT Infra Teknologi Indonesia. Atas setoran modal tersebut sudah diakui sebagai tambahan modal Perusahaan didalam Akta pada tanggal 25 Juli 2025.

Berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham tanggal 2 Juli 2025 bahwa Pemegang Saham telah menambahkan modal sebesar Rp5.045.175.000 dimiliki oleh Finfra Tech Holdings Pte. Ltd. Atas setoran modal tersebut masih menunggu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat diakui sebagai tambahan modal Perusahaan, sehingga sampai dengan tanggal pelaporan setoran modal tersebut belum di akta kan.

14. SHARE CAPITAL (Continued)

Subscribed Shares Capital (Continued)

Based on the Financial Services Authority (OJK) Decree number S-1117/PL.021/2025, dated October 29, 2025, the Financial Services Authority (OJK) has approved an additional capital of Rp890,325,000 held by PT Infra Teknologi Indonesia. This capital contribution has been recognized as additional capital of the Company in the Deed dated July 25, 2025.

Based on the Shareholders' Decree dated July 2, 2025, the Shareholders have increased the capital by Rp5,045,175,000 held by Finfra Tech Holdings Pte. Ltd. This capital contribution is currently pending approval from the Financial Services Authority (OJK) to be recognized as additional capital of the Company. Consequently, as of the reporting date, the capital contribution has not yet been notarized in a Deed.

15. PAJAK PENGHASILAN

a. Utang Pajak

	2025	2024	
Pasal 21	3.934.548	2.568.703	Article 21
Pasal 23	37.530.852	28.836.675	Article 23
Pasal 26	121.962.473	8.909.222	Article 26
Pasal 29	-	128.689.112	Article 29
Pasal 4 (2)	20.451.736	1.151.226	Article 4 (2)
PPN keluaran	142.985.908	132.338.152	Vat out
Jumlah	326.865.517	302.493.090	Total

b. Beban Pajak Penghasilan

	2025	2024	
Pajak penghasilan - tahun berjalan			Income tax expense - current year
Pajak kini atas laba tahun berjalan	-	(128.689.112)	Current tax on profit for the year
Manfaat pajak tangguhan	104.083.481	83.790.419	Deferred tax benefit
Beban pajak penghasilan yang dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	104.083.481	(44.898.693)	Income tax expense reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income

15. INCOME TAX

a. Taxes Payables

b. Income Tax Expenses

15. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

15. INCOME TAX (Continued)

c. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

c. Corporate Income Tax

The reconciliation between income (loss) before income tax expense as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan			Profit (loss) before income tax per
berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(932.521.260)	977.021.779	statement of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan temporer			Temporary differences
Beban (manfaat) imbalan pascakerja	473.106.731	380.865.541	Post employee expenses (benefit)
Perbedaan tetap			Permanent differences
Beban yang tidak dapat dikurangkan	539.841.979	155.499.772	Non-deductible expenses
Penghasilan yang telah dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat Final	(124.849.938)	(34.509.450)	Income already subjected to final income tax
Laba fiskal sebelum akumulasi rugi fiskal	(44.422.488)	1.478.877.642	Taxable profit before accumulated taxable loss
Laba fiskal setelah pembulatan	(44.422.000)	1.478.877.000	
Rugi fiskal			Taxable loss
Tahun 2019	-	(793.348.219)	Year 2019
Laba (rugi) fiskal	-	685.528.781	Taxable gain (loss)
Jumlah akumulasi rugi fiskal	-	-	Total accumulated taxable loss
Fasilitas			Facilities
Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008			Article 17 Law No. 36 Year 2008
Pendapatan kena pajak - fasilitas	-	201.156.540	Taxable income – facilities
50% x 22% x proporsional laba fiskal	-	22.127.219	50% x 22% x proportional fiscal income
Non fasilitas			Non-facilities
Beban pajak penghasilan – kini	-	484.372.241	Income tax expense - current
22% x laba fiskal sisa	-	106.561.893	22% x remaining fiscal income
Jumlah beban pajak penghasilan Kini	-	128.689.112	Total Income tax current expense

15. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara laporan keuangan jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajak masing-masing. Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Dibebankan ke Laba atau Rugi/ Charged to Profit or Loss</u>	<u>Dibebankan ke Penghasilan Komprensif lain/ Charged to Other Comprehensive Income</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>	
<u>2025</u>					<u>2025</u>
Kewajiban imbalan					Post-employment benefit
Pascakerja	193.702.473	104.083.481	(34.947.543)	262.838.411	obligation
<u>2024</u>					<u>2024</u>
Kewajiban imbalan					Post-employment benefit
Pascakerja	116.400.760	83.790.419	(6.488.706)	193.702.473	obligation

e. Pemeriksaan Pajak

Pada tahun 2023 perusahaan memperoleh Surat Keterangan Kurang Bayar (SKPKB) atas pemeriksaan pajak tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perusahaan sudah melakukan pembayaran untuk SKPKB PPN July 2019 – Desember 2019 atas Keputusan dari Kanwil sebesar Rp. 159.860.963 ini pada tanggal 10 Maret 2025 dan Rp 6.084.848 pada tanggal 26 Januari 2025.
Lalu Perusahaan juga membayarkan Denda Penagihan dari Hasil Pengajuan Keberatan yang diterima Sebagian untuk PPN masa July 2019 – Desember 2019 sebesar Rp. 47.958.291 pada tanggal 12 Agustus 2025.
Perusahaan juga membayarkan sanksi administrasi dari hasil Pemeriksaan PPN : Rp 60.748.403 pada 27 November 2025.

15. INCOME TAX (Continued)

d. Deferred Tax

Deferred tax is computed based on the effect of the temporary difference between the financial statements carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax basis. The details of deferred tax asset is as follows:

e. Tax Assessments

In 2023 the company received a Certificate of Underpayment (SKPKB) for the 2019 tax audit with the following details:

- a. The Company has paid Rp 159,860,963 for the July 2019–December 2019 VAT Tax Assessment Letter (SKPKB) based on the Regional Office Decision on March 10, 2025, and Rp 6,084,848 on January 26, 2025.
The Company also paid the Collection Fine from Partially Accepted Objections for the July 2019–December 2019 VAT period, amounting to Rp 47,958,291, on August 12, 2025.
The Company also paid the administrative sanction resulting from the VAT Audit: Rp 60,748,403 on November 27, 2025.

15. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

e. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

Pada tahun 2023 perusahaan memperoleh Surat Keterangan Kurang Bayar (SKPKB) atas pemeriksaan pajak tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut: (Lanjutan)

- b. SKPKB atas pemeriksaan pajak PPh 26 dengan jumlah kurang bayar Rp557.069.332. Atas kurang bayar tersebut Perusahaan mengajukan keberatan pada tanggal 19 Maret 2024. Pada tanggal 12 Desember 2024 Perusahaan telah memperoleh hasil putusan pajak dengan kurang bayar pajak yang sama. Terkait kekurangan pembayaran, Perusahaan saat ini sedang mengevaluasi keputusan tersebut bersama dengan konsultan pajak dan akan menentukan langkah selanjutnya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan pajak.

f. Administrasi Pajak

Perubahan tarif pajak

Pada tanggal 18 Mei 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No 2 tahun 2020 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ("Perppu-1") serta Peraturan Pemerintah No 30 tahun 2020. Salah satu hal yang diuraikan dalam UU No 2 dan No 30 yaitu penurunan tarif pajak penghasilan Badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020-2021 dan penurunan selanjutnya 20% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2023 ke depan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2023 dan seterusnya, dan pengurangan tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

15. INCOME TAX (Continued)

e. Tax Assessments (Continued)

In 2023 the company received a Certificate of Underpayment (SKPKB) for the 2019 tax audit with the following details: (Continued)

- b. SKPKB for PPh 26 tax audit with underpayment amount of Rp557,069,332. Regarding the underpayment, the Company submitted an objection on March 19, 2024. On December 12, 2024, the Company received a tax decision with similar tax underpayment. Regarding the underpayment notice, the Company is currently assessing the decision together with its tax consultant and will decide on the next steps within the time prescribed by the tax regulations.*

f. Tax Administration

The change in tax rate

On May 18, 2020, the Government of Indonesia issued Law No. 2 of 2020 in lieu of Law No. 1 of 2020 ("Perppu-1") as well as Government Regulation No. 30 of 2020. One of the things outlined in Laws No. 2 and No. 30 is reduction in corporate income tax rate from 25% to 22% for the 2020-2021 tax year and a further 20% reduction which will take effect from the 2023 tax year onwards.

On October 29, 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No. 7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2023 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements.

15. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

f. Administrasi Pajak (Lanjutan)

Perubahan tarif pajak (Lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan menghitung menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terhutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya jangka waktu tersebut adalah sepuluh (10) tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013 sedangkan untuk tahun 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima (5) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Manajemen berpendapat bahwa Perusahaan telah patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada.

15. INCOME TAX (Continued)

f. Tax Administration (Continued)

The change in tax rate (Continued)

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. Under prevailing regulations the Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within a certain period. For the fiscal years of 2007 and before, this period is within 10 (ten) years of the time the tax become due, but not later than 2013, while for the fiscal years of 2008 and onwards, the period is within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

The management believes that the Company have complied with the prevailing tax regulations.

16. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Komisi	15.427.153.106	16.358.096.744	Commission fees
Jumlah	<u>15.427.153.106</u>	<u>16.358.096.744</u>	Total

16. REVENUES

This account consists of:

17. BEBAN GAJI DAN IMBALAN KARYAWAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Gaji	7.816.665.698	8.858.303.897	Salaries
Tunjangan lainnya	1.092.067.475	901.269.831	Other employee benefits
Insentif	1.002.532.102	775.316.993	Incentives
Beban kewajiban pascakerja (Catatan 13)	473.106.731	380.865.541	Post employee benefit obligation expenses (Note 13)
Jumlah	<u>10.384.372.006</u>	<u>10.915.756.262</u>	Total

17. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES

This account consists of:

18. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban profesional	1.287.829.622	766.626.811
Beban lisensi dan data center	521.002.243	510.407.826
Beban teknologi	498.770.523	406.722.997
Beban penagihan	313.128.585	666.883.772
Depresiasi aset tetap (Catatan 9)	144.597.797	135.707.085
Keanggotaan dan langganan	81.458.503	36.438.042
Beban perjalanan bisnis dan transportasi	22.160.494	86.508.564
Beban rekrutmen dan pelatihan	9.673.469	14.292.264
Lain-lain	<u>233.383.690</u>	<u>162.821.252</u>
Jumlah	<u>3.112.004.926</u>	<u>2.786.408.613</u>

18. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of general and administrative expenses are as follows:

<i>Professional expenses</i>
<i>License and data center expenses</i>
<i>Technology expenses</i>
<i>Collection expenses</i>
<i>Depreciation of fixed assets (Note 9)</i>
<i>Business trip and transportation expenses</i>
<i>Recruitment & training expenses</i>
<i>Others</i>
<i>Total</i>

19. BEBAN KANTOR

Rincian beban kantor adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban aset hak guna usaha (Catatan 10)	740.625.237	788.261.902
Beban telepon, fax dan internet	124.250.903	128.316.262
Beban listrik dan air	110.967.851	124.265.079
Beban bunga sewa (Catatan 27)	18.390.875	22.136.287
Beban sewa	10.200.000	10.106.500
Beban keamanan dan kebersihan	4.768.500	6.552.000
Lain-lain	<u>14.861.587</u>	<u>1.690.000</u>
Jumlah	<u>1.024.064.953</u>	<u>1.081.328.030</u>

19. OFFICE EXPENSES

The details of office expenses are as follows:

<i>Right-of-use asset expense (Note 10)</i>
<i>Phone, fax & internet expense</i>
<i>Electricity and water expense</i>
<i>Leasing interest expense (Note 27)</i>
<i>Rent expense</i>
<i>Security & cleanliness expense</i>
<i>Others</i>
<i>Total</i>

20. PENGHASILAN (BEBAN) OPERASIONAL LAIN – BERSIH

Penghasilan (beban) operasional lainnya terdiri dari pendapatan bunga deposito bank dan pendapatan lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 2025 dan 2024 adalah (Rp)128.141.460) dan Rp119.515.458.

20. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES) – NET

Other operating income (expenses) consists of interest deposits bank income and others income for the years ended 2025 and 2024 were (Rp)128,141,460) and Rp119,515,458, respectively.

21. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Tabel berikut menyajikan transaksi dengan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta saldo dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	Jumlah/Total		Persentase Terhadap Total Penjualan atau Penghasilan atau Beban yang Bersangkutan/ Percentage to Total Sales or the Related Income or Expenses		
	2025	2024	2025	2024	
Pendapatan Komisi					Commission Fee
<u>Entitas sepengendali</u>					<u>Under common control entity</u>
Gateway Indonesia Pte Ltd (GIPL)	-	9.049.967.807	0,00%	55,32%	Gateway Indonesia Pte Ltd (GIPL)

	Jumlah/Total		Persentase Terhadap Total Aset/Liabilitas/ Percentage to Total Assets/Liabilities		
	2025	2024	2025	2024	
Piutang usaha					Account receivables
<u>Entitas sepengendali</u>					<u>Under common control entity</u>
Gateway Indonesia Pte Ltd (GIPL)	810.724.848	3.375.409.013	5,03%	32,00%	Gateway Indonesia Pte Ltd (GIPL)

Sifat dari transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Perusahaan mencatatkan pendapatan *fee* dari penyaluran dana dari Pemilik Dana yang berasal dari pihak berelasi.

Perusahaan mencatatkan piutang usaha yang berasal dari tagihan *fee* kepada pihak berelasi atas penyaluran pinjaman kepada Peminjam.

Perusahaan mencatatkan gaji dan tunjangan yang dibayar untuk Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp854.900.600 dan Rp848.741.350 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

21. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

The following tables provide the transactions that have been entered into with related parties for the years ended December 31, 2025 and 2024, as well as balances with related parties as of December 31, 2025 and 2024:

The nature of significant transactions with related parties are as follows:

The Company recorded fee income from the disbursement of funds from Lender originating from related parties.

The Company records accounts receivable originating from fee bills to related parties from the disbursement of loans to borrowers.

The Company recorded salaries and benefits paid to its Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp854,900,600 and Rp848,741,350 for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

22. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aset Perusahaan keuangan utama terdiri dari kas dan setara kas dan uang jaminan. Perusahaan juga memiliki berbagai liabilitas keuangan seperti utang lain-lain, utang pemegang saham dan biaya yang masih harus dibayar.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko mata uang dan risiko likuiditas. Direksi mengulas dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko, yang dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

Nilai imbalan jangka pendek kepada Direktur telah dicatat sebagai bagian dari akun beban gaji.

Risiko mata uang

Mata uang pelaporan Perusahaan adalah Rupiah. Perusahaan dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena pertukaran mata uang asing atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh tolak ukur perubahan harganya dalam mata uang asing. Saat ini, Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing.

Risiko likuiditas

Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat membiayai pengeluaran modal dan membayar utang yang jatuh tempo dengan mempertahankan kas dan setara kas yang cukup dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah yang cukup.

Perusahaan secara rutin mengevaluasi proyeksi dan aktual informasi arus kas dan terus menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk melihat peluang.

Risiko likuiditas berkaitan dengan risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya.

22. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Company's main financial assets comprise of cash and cash equivalents and security deposit. The Company also has various financial liabilities such as other payables, due to shareholder and accrued expenses.

The main risks arising from the Company's financial instruments are foreign currency risk and liquidity risk. The Board of Directors reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are described in more details as follows:

Short-term benefits to its Directors are recorded as part of salary expense.

Foreign currency risk

The Company's reporting currency is the Rupiah. The Company faces foreign exchange risk from foreign denominated currency or price significantly influenced by their benchmark price movements in foreign currencies. Currently, the Company does not have a formal hedging policy for foreign currency exposures.

Liquidity risk

The Company manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditures and service its maturing debts by maintaining sufficient cash and cash equivalents and the availability of funding.

The Company regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities.

Liquidity risk pertain to the risk that the Company will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivery of cash or another financial asset.

22. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko likuiditas (Lanjutan)

Tabel di bawah ini menganalisis kewajiban keuangan Perusahaan ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa hingga tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah yang diungkapkan dalam table adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

31 Desember 2025/ <i>December 31, 2025</i>						
	Jangka Pendek/ <i>Current</i>		Jangka Panjang/ <i>Non-current</i>			
	Dalam 6 Bulan/ <i>Within 6 Months</i>	6 - 12 bulan/ <i>6 - 12 Months</i>	1 - 5 Tahun/ <i>1 - 5 Years</i>	Lebih dari 5 Tahun/ <i>More than 5 Years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Utang lain-lain Pihak ketiga	337.602.191	-	-	-	337.602.191	<i>Other payable Third party</i>
Biaya yang masih harus dibayar	350.934.259	-	-	-	173.441.416	<i>Accrued expense</i>
Jumlah	688.536.450	-	-	-	688.536.450	<i>Total</i>

31 Desember 2024/December 31, 2024						
	Jangka Pendek/Current		Jangka Panjang/Non-current			
	Dalam 6 Bulan/	6 - 12 bulan/	Lebih dari 5 Tahun/			
	Within 6 Months	6 - 12 Months	1 - 5 Tahun/	Yahun/		
			1 - 5 Years	More than 5 Years	Jumlah/Total	
Utang lain-lain Pihak ketiga	512.529.697	-	-	-	512.529.697	Other payable Third party
Biaya yang masih harus dibayar	173.441.416	-	-	-	173.441.416	Accrued expense
Jumlah	685.971.113	-	-	-	685.971.113	Total

Risiko kredit

Perusahaan menempatkan saldo bank mereka pada lembaga keuangan yang layak kredit.

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa rekanan gagal melepaskan kewajiban kepada Perusahaan yang mengakibatkan kerugian.

Risiko kredit Perusahaan terutama disebabkan oleh kas dan setara kas dan jaminan. Kebijakan Perusahaan adalah hanya berurusan dengan pihak ketiga yang layak kredit dan lembaga keuangan. Eksposur dan rekanan Perusahaan terus di monitor.

22. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)

Liquidity risk (Continued)

The table below analyses the Company's financial liabilities into relevant maturity grouping based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.

Credit risk

The Company places their bank balances with credit worthy financial institutions.

Credit risk refers to the risk that a counterparty fails to discharge an obligation to the Company resulting in a loss.

The Company's credit risk is primarily attributable to cash and cash equivalents and security deposits. The Company's policies are to deal only with respected and credit worthy third parties and reputable financial institutions. The Company's exposure and counterparties are continuously monitored.

22. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko kredit (Lanjutan)

Table berikut ini meringkas jumlah tercatat aset keuangan yang dicatat dalam laporan keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang mewakili risiko eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

31 Desember 2025/December 31, 2025						
	Belum Jatuh Tempo/ <i>Past Due Not Impaired</i>	Kurang dari 3 Bulan/ <i>Less than 3 Months</i>	3 Bulan - 1 Tahun/ <i>3 Months-1 Years</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 years</i>	Jumlah/Total	
Kas dan setara kas	-	10.940.482.762	-	-	10.940.482.762	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	-	924.570.888	441.567.661	-	1.366.138.549	Account receivables
Aset lancar lainnya	-	673.874.573	-	-	673.874.573	Other current assets
Uang jaminan	-	-	41.114.347	264.636.378	305.750.725	Security deposits
Jumlah	-	12.538.928.223	482.682.008	264.636.378	13.286.246.609	Total
31 Desember 2024/December 31, 2024						
	Belum Jatuh Tempo/ <i>Past Due Not Impaired</i>	Kurang dari 3 Bulan/ <i>Less than 3 Months</i>	3 Bulan - 1 Tahun/ <i>3 Months-1 Years</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 years</i>	Jumlah/Total	
Kas dan setara kas	-	5.160.341.261	-	-	5.160.341.261	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	-	3.838.748.185	60.664.833	-	3.899.413.018	Account receivables
Aset lancar lainnya	-	546.313.595	-	-	546.313.595	Other current assets
Uang jaminan	-	154.495.836	110.140.542	-	264.636.378	Security deposits
Jumlah	-	9.545.403.041	170.805.375	-	9.870.704.252	Total

23. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dinyatakan dalam posisi keuangan 31 Desember 2025 dan 2024:

		2025		
	Nilai Tercatat Carrying Value	Nilai Wajar Fair Value		
Aset keuangan			Financial assets	
Kas dan setara kas	10.940.482.762	10.940.482.762	Cash and cash equivalents	
Piutang usaha	1.366.138.549	1.366.138.549	Account receivables	
Aset lancar lainnya	673.874.573	673.874.573	Other current assets	
Uang jaminan	305.750.725	305.750.725	Security deposits	
Jumlah	13.286.246.609	13.286.246.609	Total	
Liabilitas keuangan			Financial liabilities	
Utang lain-lain			Other payables	
Pihak ketiga	337.602.191	337.602.191	Third party	
Biaya yang masih harus dibayar	350.934.259	350.934.259	Accrued expenses	
Jumlah	688.536.450	688.536.450	Total	

23. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(Lanjutan)

23. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(Continued)

	2024		
	Nilai Tercatat Carrying Value	Nilai Wajar Fair Value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	5.160.341.261	5.160.341.261	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	3.899.413.018	3.899.413.018	Account receivables
Aset lancar lainnya	546.313.595	546.313.595	Other current assets
Uang jaminan	264.636.378	264.636.378	Security deposits
Jumlah	9.870.704.252	9.870.704.252	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang lain-lain			Other payables
Pihak ketiga	512.529.697	512.529.697	Third party
Biaya yang masih harus dibayar	173.441.416	173.441.416	Accrued expenses
Jumlah	685.971.113	685.971.113	Total

24. TRANSAKSI OFF BALANCE SHEET

24. OFF BALANCE SHEET TRANSACTIONS

Per 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah penyaluran dana dari pemberi pinjaman kepada peminjam masing-masing sebesar Rp166.439.534.149 dan Rp138.065.010.329. Jumlah outstanding dari pendanaan yang disalurkan kepada peminjam masing-masing sebesar Rp84.417.912.523 dan Rp38.941.484.647.

As of December 31, 2025 and 2024, total disbursement channeled to the borrowers from the lenders are Rp166,439,534,149 and Rp138,065,010,329 respectively. Total outstanding from the channeled funding to the borrowers are Rp84,417,912,523 and Rp38,941,484,647, respectively.

Perusahaan bertindak sebagai perantara antara penerima pinjaman yang membutuhkan dana untuk usahanya dengan pemberi pinjaman, dengan menyediakan platform pinjam meminjam secara online. Risiko kredit atau gagal bayar atas pinjaman yang disalurkan berada sepenuhnya pada pemberi pinjaman sehingga pinjaman yang masih berjalan dicatat di luar neraca.

The Company acted as the agent to connect the borrowers who need lenders through online peer to peer platform. Credit risk or risk of default on loans is fully borne by the lender therefore the outstanding loans is recorded off-balance sheet.

25. REKENING ESCROW

25. ESCROW ACCOUNTS

Dalam menjalankan usahanya Perusahaan memiliki rekening escrow dengan rincian sebagai berikut ini:

In carrying out its business, the Company has an escrow account with the following details:

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan Tahun Berjalan/ Additional Current Year	Pengembalian tahun berjalan/ Current Years Return	Saldo Akhir/ Ending Balance	
2025					2025
Hak pemberi pinjaman	3.985.628.924	213.402.477.092	(214.127.058.599)	3.261.047.416	Lender's right
2024					2024
Hak pemberi pinjaman	6.335.872.882	143.359.707.779	(145.729.951.737)	3.985.628.924	Lender's right

26. KOMITMEN

Perusahaan melakukan kerjasama dengan Gateway Indonesia Pte Ltd berdasarkan Perjanjian Kerjasama nomor DMI/AMD03/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 diikuti dengan amandemen Perjanjian Kerjasama nomor DMI/AMD09/VIII/2024 tanggal 1 September 2024. Perjanjian tersebut sehubungan dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada platform Danabijak.

Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Gotyme Capital Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama nomor DMI/GOTYME/2025/001 tanggal 17 Januari 2025 diikuti dengan amandemen Perjanjian Kerjasama nomor ADD1-DMI/GOTYME/001/I/2025 tanggal 25 Januari 2025. Perjanjian tersebut sehubungan dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada platform Danabijak.

Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Carenow Indonesia Sejahtera berdasarkan Kesepakatan Kerjasama nomor 005/M/PKS/DMI/0123 tanggal 26 Juli 2022, sehubungan dengan penyediaan pembiayaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Carbay Services Indonesia berdasarkan Kesepakatan Kerjasama nomor 186/PKS/DMI/1125 tanggal 24 November 2025, sehubungan dengan penyediaan pembiayaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Gaji Pintar Indonesia berdasarkan Kesepakatan Kerjasama tanggal 19 Desember 2025 Nomor 203/PKS/DMI/1225, sehubungan dengan penyediaan pembiayaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Cipta Fasilitas Satu berdasarkan Perjanjian nomor 021/PKS/DMI/0524 tanggal 10 Mei 2024. Perjanjian tersebut sehubungan dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada platform Danabijak.

26. COMMITMENTS

The Company entered into agreement with Gateway Indonesia Pte Ltd based on Cooperation Agreement number DMI/AMD03/III/2020 dated March 16, 2020 followed by amendments to Cooperation Agreement number DMI/AMD09/VIII/2024 dated September 1, 2024. The agreement is related to Information Technology-Based Borrowing and Lending Services in the Danabijak platform.

The Company entered into agreement with PT Gotyme Capital Indonesia based on Cooperation Agreement number DMI/GOTYME/2025/001 dated January 17, 2025 followed by amendments to Cooperation Agreement number DMI/GOTYME/001/I/2025 dated January 25, 2025. The agreement is related to Information Technology-Based Borrowing and Lending Services in the Danabijak platform.

The Company entered into agreement with PT Carenow Indonesia Sejahtera based on Commercial Agreement number 005/M/PKS/DMI/0123 dated July 26, 2022, related to Information Technology-Based Borrowing and Lending Services.

The Company entered into agreement with PT Carbay Services Indonesia based on Commercial Agreement number 186/PKS/DMI/1125 dated November 24, 2025, related to Information Technology-Based Borrowing and Lending Services.

The Company entered into agreement with PT Gaji Pintar Commercial Agreement dated December 19, 2025 number 203/PKS/DMI/1225 related to Information Technology-Based Borrowing and Lending Services.

The Company entered into agreement with PT Cipta Fasilitas Satu with agreement number 021/PKS/DMI/0524 dated May 10, 2024. The agreement is related to Information Technology-Based Borrowing and Lending Services in the Danabijak platform.

26. KOMITMEN (Lanjutan)

Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Cipta Fasilitas Satu berdasarkan Perjanjian nomor 034/PKS/DMI/0624 tanggal 21 Juni 2024. Perjanjian tersebut sehubungan dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada platform Danabijak.

Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Finn Teknologi Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama nomor 086/PKS/DMI/1024 tanggal 12 Oktober 2024 dengan perubahan terakhir nomor 134/PKS/DMI/0925 tanggal 1 September 2025. Perjanjian tersebut sehubungan dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada platform Danabijak.

Perusahaan melakukan kerjasama dengan Maybright Asia Pacific Pte. Ltd. berdasarkan Perjanjian nomor 072/PKS/DMI/1024 tanggal 14 November 2024. Perjanjian tersebut sehubungan dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada platform Danabijak.

26. COMMITMENTS (Continued)

The Company entered into agreement with PT Cipta Fasilitas Satu with agreement number 034/PKS/DMI/0624 dated June 21, 2024. The agreement is related to Information Technology-Based Borrowing and Lending Services in the Danabijak platform.

The Company entered into agreement with PT Finn Teknologi Indonesia based on Cooperation Agreement number 086/PKS/DMI/1024 dated October 12, 2024 with the latest amendments number 134/PKS/DMI/0925 dated September 1, 2025. The agreement is related to Information Technology-Based Borrowing and Lending Services in the Danabijak platform.

The Company entered into agreement with Maybright Asia Pacific Pte. Ltd. with agreement number 072/PKS/DMI/1024 dated November 14, 2024. The agreement is related to Information Technology-Based Borrowing and Lending Services in the Danabijak platform.

27. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

27. ADDITIONAL CASH FLOW INFORMATION

Reconciliation of Liabilities Arising from Funding Activities

The table below shows a reconciliation of liabilities arising from funding for the periods ending December 31, 2025 and 2024.

2025					
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Cash Flow from Financing Activities					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Non Kas/ Non-cash	Saldo Akhir/ Ending Balance
Liabilitas Sewa	-	749.448.925	(767.839.800)	18.390.875	-
					<i>Lease Liabilities</i>
2024					
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Cash Flow from Financing Activities					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Non Kas/ Non-cash	Saldo Akhir/ Ending Balance
Liabilitas Sewa	779.443.382	-	(801.579.669)	22.136.287	-
					<i>Lease Liabilities</i>

28. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru. Standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau diterapkan pada laporan keuangan Perusahaan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026 dan 2027:

- PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;
- PSAK 413: Penurunan Nilai;
- PSAK 414: Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta;
- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan; dan
- PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan ini, manajemen Perusahaan masih mengevaluasi dampak potensial dari perubahan standar akuntansi tersebut terhadap laporan keuangannya.

29. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Sampai dengan tanggal pelaporan tidak terdapat kejadian signifikan.

30. KONTINJENSI

Sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen ini, Perusahaan tidak sedang terlibat dalam perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa di pengadilan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, dan Hubungan Industrial baik di pengadilan tempat kedudukan Perusahaan maupun di tempat lain.

31. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2026.

28. NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI) has issued a new amendment to the following Indonesian Financial Accounting Standards ("SFAS") and Its Interpretation to Financial Accounting Standards ("IFAS"). The accounting standards will be effective or applicable on the Company's financial statements for the period beginning on or after January 1, 2026 and 2027:

- *SFAS 109: Financial Instrument and SFAS 107 Financial Instrument: Disclosure related to Classification and Measurement of Financial Instruments;*
- *SFAS 413: Impairment;*
- *SFAS 414: Impairment of Sharia Financial Assets for Entities Applying Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities;*
- *SFAS 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements; and*
- *SFAS 119: Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures.*

As of the authorization date of these financial statements, the Company's management is still evaluating the potential impact on these amended accounting standards on its financial statements.

29. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

As of the reporting date, there were no significant incidents.

30. CONTINGENCY

As of the date of the issuance of the Independent Auditor's Report, the Company is not involved in criminal, civil, tax disputes, and disputes in the judiciary in the State Administration, the Indonesian National Board Arbitration, Commerce, and Industrial Relations in the court of residence Company or elsewhere.

31. MANAGEMENT RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Company is responsible for the preparation of the financial statements which are completed and authorized for issue on March 25, 2026.